

## ABSTRAK

Pada *double track system* perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika. Rumusan pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana penerapan *Double Track System* Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009?; 2) Apa hambatan dan solusi dalam penerapan *Double Track System* bagi pelaku penyalahgunaan narkotika menurut UU Nomor 35 Tahun 2009?; 3) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika?

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni penerapan *Double Track System* bagi pelaku penyalahgunaan narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan

Penerapan *double track system* Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada prinsipnya bisa diketahui dari Naskah Akademik undang-undang tersebut. Berdasarkan pada sinopsis dari Naskah Akademik UU Narkotika yang diterbitkan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A R.I Tahun 2005 yang menyebutkan latar belakang dibentuknya UU Narkotika menyebabkan kriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkoba. Ketentuan pidana pada UU Narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Dalam UU Narkotika mengamanatkan kewajiban untuk menjalani perawatan dan pengobatan atau rehabilitasi bagi pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika. Hambatan penerapan *Double Track System* bagi pelaku penyalahgunaan narkotika menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 yaitu adanya aturan yang berbeda yang bisa diterapkan untuk perbuatan yang sama yaitu penyalahgunaan narkotika; sarana dan prasarana serta petugas yang belum memadai untuk para pelaku yang diberikan sanksi tindakan; Pelaku penyalahgunaan narkotika tidak di tahan memungkinkan melarikan diri. Solusi penerapan *double track sistem* bagi penyalahgunaan narkotika yang sebaiknya dilakukan yaitu pemberian sanksi pidana yang berat ditambah dengan pemberian sanksi tindakan yang terpadu dan terawasi sampai pelaku benar-benar sembuh. Kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika menurut perspektif KUHP dalam sistem pidanaannya juga menganut sistem dua jalur (*double track system*), hal ini tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang memuat sanksi yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

**Kata Kunci : *Double Track System*, Pelaku Penyalahgunaan Narkotika**

## **ABSTRACT**

*In the double track system the formulation of sanctions against narcotics abuse is a criminal law policy in the formulation of provisions regulating the sanctions given to the perpetrators of narcotics abuse. The formulation of this research is 1) How is the application of Double Track System for Abuse of Narcotics Pursuant According to Law Number 35 Year 2009 ?; 2) What are the obstacles and solutions in the application of Double Track System to the perpetrators of narcotics abuse according to Law Number 35 Year 2009 ?; 3) What is the future criminal law policy towards the perpetrators of narcotics abuse?*

*The method used in writing this thesis is done by normative juridical approach. The specification of this research is descriptive analytical. Namely the application of the Double Track System for the perpetrators of narcotics abuse under Law No. 35 Year 2009. Data collection is done by procedure of Study of Library and Field Study*

*Implementation of double track system For Abuse of Narcotics Actors in Law No. 35 of 2009 on Narcotics in principle can be known from the Academic Paper of the law. Based on the synopsis of the Academic Draft of Narcotics Law published by Law and Justice Research Center M.A R.I Year 2005 which mentions the background of the formation of Narcotics Law led to the criminalization of drug abuse. The criminal provisions of the Narcotics Law are regulated in Articles 111 to 148. In the Narcotics Act mandates the obligation to undergo treatment and treatment or rehabilitation for narcotics addicts or narcotics abuse victims. Barriers to the implementation of Double Track System for the perpetrators of drug abuse according to Law Number 35 Year 2009 is the existence of different rules that can be applied to the same act of abuse of narcotics; Facilities and infrastructure and officers that have not been sufficient for actors who are given action sanction; The perpetrators of narcotics abusers are not resistant to allow escape. Solution application of double track system for narcotics abusers should be done that is a heavy penalty sanctions coupled with the provision of action sanctions are integrated and supervised until the perpetrator completely healed. The future criminal law policy against the perpetrators of narcotics abuse according to the Criminal Code perspective in its punishment system also embraces a double track system, as stated in Article 10 of the Criminal Code which contains sanctions comprising of principal and additional criminal sanctions.*

**Keywords: Double Track System, Narcotics Abuse Actors**